



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di Sektor Publik

Challenges to Public Participation in Decision-Making in the Public Sector

Maria Sarah Doko^{1*}, Desilian Anjelika Putri Sngain²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto – Kupang – NTT

*Corresponding Author: E-mail: sarahdoko01@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Mei, 2026

Revised: 23 June, 2026

Accepted: 17 July, 2026

Kata Kunci:

Partisipasi, Pengambilan Keputusan, Sektor Publik

Keywords:

Participation, Decision-Making, Public Sector

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11637](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11637)

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat adalah bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik karena membantu meningkatkan legitimasi, transparansi, akuntabilitas serta kualitas kebijakan yang dihasilkan. Faktanya di lapangan, partisipasi masyarakat masih mengalami berbagai kesulitan yang bisa menurunkan tingkat keberhasilan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat berbagai hambatan yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan di sektor publik dan dampak dari hal tersebut terhadap kualitas kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu dengan memeriksa berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman tentang cara mengambil keputusan, tingkat politik yang rendah, akses terbatas terhadap informasi publik, perbedaan sosial dan ekonomi yang ada, pengaruh besar dari kelompok elite, kurangnya kejelasan dari pemerintah, adanya partisipasi palsu, serta ancaman dan tekanan yang dialami masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Hambatan-hambatan itu membuat partisipasi masyarakat sering kali belum bisa berdampak maksimal terhadap isi kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dengan cara memperkuat pemahaman politik, meningkatkan akses informasi publik, menyediakan ruang partisipasi yang mencakup semua kalangan, serta memperbaiki transparansi dan tanggung jawab pemerintah.

ABSTRACT

Public participation is a crucial component of the decision-making process in the public sector because it helps enhance legitimacy, transparency, accountability, and the quality of the resulting policies. In practice, however, public participation still faces various challenges that can reduce the success of

public engagement in decision-making. This study aims to examine the various barriers that prevent the public from participating in decision-making in the public sector and the impact of these barriers on the quality of public policy. This study employs a qualitative approach using a literature review method, specifically by examining relevant books, journals, scientific articles, and policy documents. The results indicate that public participation still faces several barriers, such as a lack of understanding of the decision-making process, low levels of political engagement, limited access to public information, existing social and economic disparities, the significant influence of elite groups, a lack of clarity from the government, the presence of token participation, as well as threats and pressure experienced by citizens involved in the policymaking process. These barriers often prevent public participation from having a maximum impact on the content of the policies themselves. Therefore, efforts are needed to improve the quality of public participation by strengthening political literacy, increasing access to public information, providing opportunities for participation that include all segments of society, and improving government transparency and accountability.

PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan adalah keterampilan yang menarik dan penting bagi seorang pemimpin, karena pengambilan keputusan menentukan masa depan seorang individu. Untuk alasan ini, dalam membuat keputusan harus sangat berhati-hati dengan keputusan yang dibuat. Tentu saja, semua menyesali pilihan penting pada tahap tertentu dalam hidup. Dalam kasus kepala sekolah/pemimpin lembaga pendidikan yang berurusan dengan masalah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan organisasi, sumber daya manusia dan masalah pengawasan, mereka pasti menghadapi dilema yang berasal dari situasi yang saling bertentangan (Simarmata et al., 2021).

Pasca reformasi, Pemerintah menjamin keterbukaan akses partisipasi publik masyarakat hingga level desa melalui berbagai produk hukum baik berupa undang-undang hingga peraturan pemerintah Ramda (2025) Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan bersama, serta dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik secara normatif diharapkan dapat meningkatkan legitimasi, keterbukaan, dan akuntabilitas kebijakan pemerintah. Dalam konteks otonomi daerah, pelibatan masyarakat menjadi semakin krusial karena keputusan publik di tingkat lokal memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga (Mozin et al., 2025).

Hadi dalam Juk et al., (2024) menjelaskan bahwa masyarakat adalah pemangku kepentingan langsung akan merasakan dampak dari manfaat dan pengelolaan dari kebijakan yang diambil karena dengan adanya peran partisipasi masyarakat membuat suatu konsep yang menekankan peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan ke depannya. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama memiliki tanggung jawab untuk membangun ekosistem partisipasi yang terbuka, akomodatif, dan edukatif. Salah satu langkah penting adalah membangun saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat (Wahmina et al., 2025).

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberi landasan hukum yang kuat bagi partisipasi publik dalam proses kebijakan. Dalam konteks otonomi daerah, pelibatan masyarakat menjadi semakin krusial karena keputusan publik di tingkat lokal memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan sejak tahun 1999 memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pelayanan publik, sekaligus mendorong partisipasi lokal dalam proses pengambilan keputusan. Forum-forum partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) rutin digelar setiap tahun sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sektor publik masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Masyarakat seringkali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang proses kebijakan atau hak-hak partisipatif mereka, sehingga partisipasi yang terjadi bersifat pasif. Faktor lain seperti rendahnya literasi politik, terbatasnya akses informasi, serta kurangnya ruang deliberatif yang inklusif juga menjadi hambatan struktural yang persisten. Dalam konteks penganggaran daerah, misalnya, efektivitas forum-forum partisipatif dalam memengaruhi keputusan anggaran kerap terhambat karena masukan dari masyarakat tidak selalu memiliki daya tawar yang memadai untuk mengubah arah kebijakan. Akibatnya, ketika ruang pengambilan keputusan tertutup dari partisipasi yang bermakna, masyarakat tidak hanya kehilangan akses terhadap informasi, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memahami logika moral di balik alokasi anggaran (Mozin et al., 2025; Wahmina et al., 2025).

Di sisi lain, faktor eksternal juga turut memengaruhi, seperti dominasi elit dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya transparansi pemerintah, serta terbatasnya ruang partisipasi yang bersifat substantif. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat formalitas dan belum mampu memengaruhi substansi kebijakan secara nyata (Quick et al., 2016). Fenomena *pseudo-partisipasi* di mana keterlibatan publik hanya bersifat formalitas prosedural masih sering terjadi, baik di tingkat desa maupun nasional (Ramda, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik menjadi isu yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Kajian ini berupaya menganalisis berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat serta keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara dalam tentang konsep, teori, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kesulitan dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan di bidang publik. Cara ini memungkinkan para peneliti untuk menganalisis peran masyarakat bukan hanya sebagai bagian dari keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial, politik, dan administratif yang dipengaruhi oleh berbagai hal.

Metode studi literatur digunakan dengan mencari dan membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran masyarakat dalam partisipasi dan pengambilan keputusan di sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Data dikumpulkan dengan mencari informasi dari berbagai sumber secara teratur, menggunakan kata kunci seperti partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan bersama, kebijakan publik, literasi politik, transparansi pemerintahan, serta cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan mencari informasi, gagasan, dan teori terkait peran masyarakat dalam membuat keputusan, dengan memperhatikan berbagai sumber buku dan artikel. Data tersebut dianalisis dengan metode seperti mengelompokkan, membandingkan, mencari kesamaan dan perbedaan, serta membaca makna dari berbagai hasil yang diperoleh dari literatur yang telah diteliti (Waruwu, 2023). Proses ini dilakukan

dengan menghubungkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai masalah yang memengaruhi seberapa efektif masyarakat terlibat dalam mengambil keputusan di bidang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melanjutkan membahas peran masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik, penting untuk diingat bahwa keberhasilan keterlibatan masyarakat tidak hanya bergantung pada adanya kesempatan untuk terlibat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai hal yang memengaruhi tingkat dan kualitas partisipasi tersebut. Dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor internal masyarakat itu sendiri maupun faktor eksternal yang terkait dengan cara pemerintahan berjalan. Hambatan-hambatan itu bisa mengurangi kemampuan masyarakat untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan yang dibuat (Nelly, 2024). Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menjelaskan berbagai tantangan yang menghambat partisipasi masyarakat dan dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan di bidang publik.

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Proses Pengambilan Keputusan

Salah satu kendala utama dalam melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan di sektor publik adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tahap-tahap pengambilan kebijakan serta hak-hak partisipatif yang mereka miliki (Nelly, 2024). Banyak orang belum tahu cara kebijakan publik dibuat, siapa saja yang terlibat dalam prosesnya, serta bagaimana cara menyampaikan keinginan mereka dengan baik. Kondisi ini membuat partisipasi yang terjadi biasanya bersifat pasif dan hanya sekadar merespons undangan dalam berbagai forum konsultasi publik tanpa memberikan kontribusi yang berarti dalam proses pengambilan keputusan.

2. Rendahnya Literasi Politik Masyarakat

Literasi politik merupakan upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik (Putri, 2017).

Kurangnya literasi politik menjadi salah satu penyebab yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pemerintahan, cara kerja kebijakan publik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara membuat mereka sulit untuk mengawasi atau memberikan saran yang bermanfaat terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya, masyarakat lebih sering menerima keputusan yang sudah ditentukan tanpa memikirkan secara mendalam akibat-akibat dari kebijakan tersebut.

3. Keterbatasan Akses Informasi Publik

Partisipasi yang baik membutuhkan informasi yang jelas, benar, dan mudah diperoleh. Namun di lapangan, masih ada hambatan dalam mendapatkan informasi mengenai program, anggaran, serta proses penyusunan kebijakan (Nelly, 2024). Ketika informasi yang diberikan tidak cukup, masyarakat sulit memahami masalah yang dibahas dan tidak bisa memberikan saran yang didasarkan pada fakta. Keterbatasan dalam mendapatkan informasi juga mengurangi tingkat transparansi dan melemahkan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam membuat keputusan.

4. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga memengaruhi seberapa aktif mereka dalam membuat keputusan. Kelompok masyarakat yang ekonominya terbatas biasanya tidak punya cukup waktu, uang, atau alat yang dibutuhkan untuk ikut serta dalam berbagai forum partisipatif. Di sisi lain, kelompok yang memiliki sumber daya lebih banyak biasanya bisa mengakses proses pengambilan keputusan dengan lebih mudah, sehingga tercipta ketimpangan dalam bagaimana kepentingan masyarakat diwakili (Nelly, 2024).

5. Dominasi Elite dalam Pengambilan Keputusan

Kebanyakan elite yang berkuasa dalam politik dan birokrasi sering menghalangi masyarakat untuk terlibat secara bermakna. Meskipun masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan

mereka, keputusan akhir biasanya lebih didasarkan pada kepentingan kelompok penguasa daripada kebutuhan rakyat secara umum. Kondisi ini membuat proses partisipasi kehilangan maknanya karena masukan dari masyarakat tidak lagi menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan (Qhotimah et al., 2026).

6. Kurangnya Transparansi Pemerintah

Transparansi adalah syarat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat. Kurangnya transparansi pemerintah dalam memberikan informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta penggunaan dana dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan. Jika masyarakat tidak paham alasan di balik suatu keputusan, maka partisipasi mereka tidak efektif dan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah juga tidak kuat (Irhamdhika et al., 2025).

7. Fenomena Pseudo-Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pseudo-partisipasi adalah kondisi di mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan hanya secara formal tanpa memengaruhi hasil kebijakan secara nyata (Ramda, 2025). Dalam situasi ini, forum partisipatif seperti musyawarah atau konsultasi publik tetap diadakan, tetapi saran dari masyarakat tidak benar-benar dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir. Akibatnya, partisipasi yang seharusnya menjadi cara mewujudkan demokrasi justru kehilangan artinya dan hanya berfungsi sebagai dasar legal untuk keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya.

8. Kualitas Partisipasi Masyarakat

Kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik menjadi perhatian utama untuk memperkuat demokrasi dan memastikan pemerintah lebih bertanggung jawab. Perlu dijaga agar partisipasi bukan hanya sekadar tindakan yang dilakukan secara formal atau tampaknya saja, tetapi benar-benar mempengaruhi proses penyusunan dan penerapan kebijakan (Nelly, 2024). Ini berarti memastikan bahwa suara masyarakat yang beragam dihargai dan terwakili dalam kebijakan yang dibuat. Kualitas partisipasi juga tergantung pada seberapa serius pemerintah dan lembaga terkait menerima masukan serta pandangan dari masyarakat, serta memakainya sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih baik.

9. Ancaman, Intimidasi, dan Tekanan terhadap Partisipasi

Partisipasi masyarakat bisa terganggu karena adanya ancaman, intimidasi, atau tekanan kepada seseorang atau kelompok yang mengkritik kebijakan publik (Wahmina et al., 2025). Rasa takut terhadap dampak sosial, politik, atau hukum bisa membuat masyarakat menjadi lebih rendah semangat untuk ikut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang memastikan kebebasan berbicara dan partisipasi warga negara dalam urusan bersama.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengambil keputusan di sektor publik karena dapat meningkatkan kelegitimasan, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas kebijakan yang dihasilkan. Keterlibatan masyarakat membantu pemerintah mendapatkan berbagai masukan dan pandangan yang bisa digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, di lapangan, partisipasi masyarakat masih mengalami berbagai kendala, baik dari faktor dalam maupun luar. Hambatan tersebut mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pembuatan kebijakan, rendahnya pengetahuan politik, terbatasnya akses informasi publik, perbedaan sosial dan ekonomi yang besar, pengaruh besar dari kelompok elit dalam mengambil keputusan, kurangnya kejelasan dan transparansi dari pemerintah, munculnya partisipasi semu, serta adanya ancaman dan tekanan terhadap orang-orang yang ingin secara aktif terlibat dalam proses tersebut.

Berbagai hambatan itu membuat partisipasi masyarakat sering kali belum berjalan dengan baik dan belum bisa memengaruhi isi kebijakan secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat peran masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang politik, memperluas akses

terhadap informasi publik, menyediakan tempat partisipasi yang menyertakan semua kalangan, meningkatkan kejelasan dan kesopanan pemerintah, serta memperkuat perlindungan terhadap hak untuk mengungkapkan pendapat bebas. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bisa berjalan lebih bermakna dan ikut berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif, serta akuntabel.

DAFTAR RUJUKAN

- Irhamdhika, G., Iman, N., Hidayah, E., Ariska, Y., Ningtyas, A., & Sari, A. (2025). *Krisis Kepercayaan Publik: Fenomena #Kaburajadulu Dan Peran Humas Pemerintah Dalam Merespons Cancel Culture* (Vol. 6).
- Juk, B., Shaw, F. R., Alaydrus, A., & Hastira, Muh. F. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *International Journal Demos*, 6.
- Mozin, S. Y., Patuti, V. I., Hasan, H., Mahmud, Z., & Sampara, M. P. (2025). DEMOKRASI PARTISIPATIF DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA. *Journal of Publicness Studies (JPS)*, 02.
- Nelly, S. (2024). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK*. 6(1).
- Putri, N. E. (2017). DAMPAK LITERASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU. *Jurnal Agregasi*, 5. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>
- Qhotimah, H. N., Dani, R., Khatta, J. A., & Santoso, R. (2026). Transformasi Sistem Politik Indonesia dalam Bayang-Bayang Sentralisasi Kekuasaan dan Politik Elit. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 3(2), 1174–1187. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i2.9729>
- Quick, K. S., Bryson, J. M., Torbing, J., Ansell, C., & Elgar, E. (2016). *Theories of Governance*. Edward Elgar Press.
- Ramda, E. E. (2025). Deliberative Public Policy of Village Governance: Legal-Historical Notes During the Implementation of Regional Autonomy. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 5(1), 67–78. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.67-78>
- Simarmata, N. I. P., Purba, B., Purba, S., Silalahi, M., Raynoto, M. Y., Sudarso, A., Handiman, U. T., Hidayatulloh, A. N., Karwanto, Samosir, K., Putri, D. M. B., Djufri, I., & Yuswardi. (2021). *Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan*. Yayasan Kita Menulis.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Wahmina, N. H., Rahmania, R. Y., & Maula, S. L. (2025). *DEMOKRASI TANPA PARTISIPASI: STUDI KRITIS TERHADAP KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN NASIONAL*. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15914473>